

**NASKAH PUBLIKASI**

**EVALUASI KINERJA *E-PROCUREMENT* PADA LAYANAN  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KOTA BATAM  
TAHUN 2017-2018**



Mengetahui,

  
Dekan, Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik  
Dr. Hita Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603163038

  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403163025

**EVALUASI KINERJA *E-PROCUREMENT* PADA LAYANAN  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BATAM TAHUN  
2017-2018**

**Tiara Ramadhani**

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

tiara.ramadhani1997@gmail.com

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menjalankan e-procurement pada tahun 2017-2018. Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam terdapat banyak keluhan-keluhan dari penyedia jasa dengan hasil pelelangan yang telah ditetapkan oleh panitia. Maka dari itu peneliti akan melihat daya tanggap dari panitia lelang dalam menangani keluluruhan dari penyedia jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*

*Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Hal tersebut dikarenakan pada metodologi kualitatif ini bertujuan untuk. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa panitia atau pelaksana lelang mampu memberikan tanggapan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses lelang masa sanggah, tanya jawab untuk penyedia jasa bertanya seputar proses lelang, LPSE Kota Batam mampu membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukannya yaitu laporan rencana paket pengadaan, laporan progres fisik dan laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan setiap tahunnya kepada LKPP melalui SISMON TEPPRA. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari LPSE Kota Batam ini dilihat dari struktur organisasi, kebijakan pengelolaan berupa visi misi organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana atau prasarana yang memadai.*

*Kesimpulan dalam penelitian ini adalah evaluasi e-procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam tahun 2017-2018 sudah dapat dikatakan baik hal ini dibuktikan dengan responsivitas, akuntabilitas dan faktor-*

*faktor yang mempengaruhi kinerja dari LPSE Kota Batam itu sendiri. Saran pada penelitian ini LPSE diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksana, apabila perubahan versi pada sistem diharapkan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada penyedia jasa dan mampu meningkatkan kapasitas sistem agar tidak terjadi server down.*

**Kata Kunci :** *Evaluasi Kinerja, E-Procurement, LPSE Kota Batam*

## **PENDAHULUAN**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang baik adalah dengan cara perubahan atau reformasi dalam tata pemerintahan dengan menerapkan kegiatan yang didukung oleh teknologi informasi (*e-government*). Salah satu penerapan *e-governament* di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (Basrie, 2017). Dalam proses pengadaan barang dan jasa secara manual yang dilakukan dengan cara tatap muka antara panitia lelang dengan penyedia jasa memiliki banyak permasalahan. Permasalahan itu antara lain terjadinya suap agar dapat memenangkan lelang, dalam proses lelang yang tidak transparan dan pengusaha yang mengikuti lelang banyak yang tidak memenuhi kualifikasi dalam segi persyaratan (Udoyono, 2012).

Alasan diterapkannya pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau *e-procurement* di Indonesia karena tingginya tingkat korupsi yang terjadi pada pengadaan barang atau jasa ini. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa rentannya kasus korupsi yang ada di pengadaan barang atau jasa tahun 2017 terdapat 84 kasus yang teridentifikasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (Wildansyah, 2018). Kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sangat

rentan ketika proses lelang. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga menyatakan masih banyak lembaga-lembaga yang belum melaporkan pengadaan barang dan jasa pada sistem yang telah disediakan melalui website <http://monev.lkpp.go.id/> (Wildansyah, 2018).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* ini di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa sistem pelelangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan yang mempunyai jasa atau produk yang dibutuhkan, yang dalam pelaksanaannya melalui internet. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini dibuat karena banyaknya penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan adanya kebijakan ini di harapkan bisa meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dan penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya *e-procurement* ini kegiatan pengadaan dilakukan lebih transparan, lebih hemat waktu dan lebih mudah melakukan pertanggung jawaban keuangan (Kasiwi, 2015).

*E-procurement* ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan barang dan jasa yang dahulunya di instansi pemerintah yang dilaksanakan dengan metode manual, dengan adanya kebijakan baru yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Yang mana semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan internet. *E-procurement* ini merupakan sebuah inovasi pelayanan yang baik.

Perkembangan teknologi seperti sekarang ini sudah seharusnya dijadikan sebagai momen yang bagus bagi pemerintah Kota Batam untuk melakukan atau mengadopsi sistem *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih mudah terkait pengadaan barang dan jasa. Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam mengimplentasi sistem *e-procurement*. LPSE Kota Batam mulai beroperasi pada tanggal 15 Agustus 2009 dengan alamat website (<https://lpse.batam.go.id/eproc/>). Dengan adanya LPSE diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa secara khusus, belanja barang dan modal pada umumnya dapat dilaksanakan lebih cepat (Nasution, 2012). LPSE Kota Batam ini dalam menjalankan tugasnya menguikuti panduan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas secara terencana dan berkelanjutan yang didalamnya termasuk pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan diharapkan informasi-informasi yang terkait pengadaan dapat terkompilasi dan terintegrasi dengan baik dan lengkap sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat dari informasi pengadaan.

Keberhasilan kerja pegawai yang dilihat dari segi kuantitas dan kualitas memerlukan perhatian dan keseriusan dari pegawai itu sendiri untuk dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk meningkatkan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Kinerja pegawai dilihat dari pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan, program, kebijakan dalam perumusan perencanaan strategis oleh sebuah organisasi atau lembaga. Kinerja pegawai dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Rahmadhani, 2016).

Jika dilihat dari kualitas pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu sendiri masih sering terjadi permasalahan yang sering mereka alami seperti dapat dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), walaupun anggota bersertifikat namun kenyataan masih ada yang kurang memahami proses pengadaan barang atau jasa tersebut seperti proses tahapan dalam lelang antara lain mulai dari Pengumuman Pascakualifikasi, Pemberian Penjelasan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Masa Sanggah Hasil Lelang, sampai proses pendatanganan kontrak (Barahona, 2012). Pada laporan kinerja yang dikeluarkan oleh LKPP tahun 2016 masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan pihak LPSE dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang terjadi seperti, masih rendahnya pemahaman dan penerapan peraturan dan pola pikir pelaksana belum sesuai dengan prinsip pengadaan. Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada tahun 2016, maka peneliti ingin melihat apakah permasalahan tersebut dapat diatasi pada tahun berikutnya pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin meneliti bagaimana kinerja *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) di Kota Batam pada tahun 2017-2018 dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat kinerja.

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan *e-procurement* di Kota Batam tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam.

## **PEMBAHASAN**

Terdapat dua parameter untuk mengukur indikator ini, yaitu: Responsivitas dan Akuntabilitas. Responsivitas menjelaskan mengenai daya tanggap atau ketepatan pelayanan yang diberikan kepada penyedia. Indikator kedua, akuntabilitas pelayanan publik dimaknai sebagai prinsip suatu organisasi wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana evaluasi kinerja *e-procurement* di LPSE Kota Batam berjalan dengan baik atau tidak, maka dapat dilihat dari indikator evaluasi kinerja yang menjadi tolak ukur dalam menilai bagaimana kinerja dari LPSE Kota Batam pada tahun 2017-2018. Berikut indikator evaluasi kinerja menurut (Agus Dwiyanto, 2006), yaitu:

1. Responsivitas

Responsivitas memiliki makna bahwa lembaga – lembaga pemerintah harus mampu melayani masyarakat. Responsivitas dalam diukur dengan daya tanggap aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi, perkembangan, tuntutan dan pengetahuan yang baru. Dalam konteks birokrasi pemerintah, resposivitas menunjuk pada keselarasan antar program dan pelayanan yang sudah dibuat dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Responsivitas merupakan indikator dari kinerja karena responsivitas menggambarkan secara langsung kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya. Responsivitas pada LPSE Kota Batam dapat dilihat dari bagaimana cara aparatur menghadapi permasalahan yang terjadi, dalam konteks ini dapat dilihat dari:

#### **A. Tahapan Lelang Melalui Masa Sanggah**

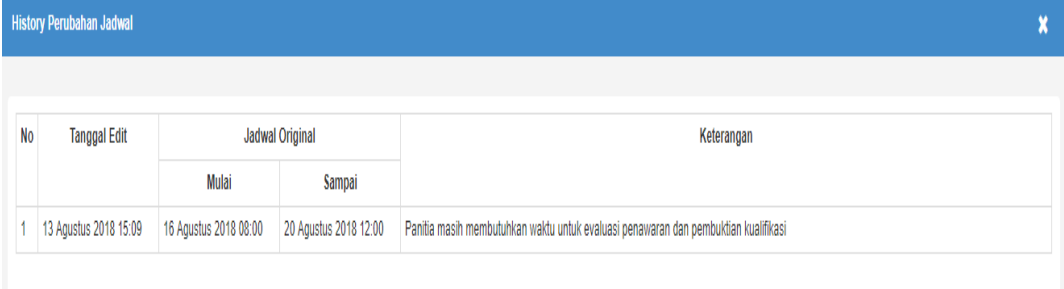
Pelayanan Pelayanan merupakan pemberian kepuasan kepada penyedia, pelayanan sangat diperlukan untuk kenyamanan penyedia dalam melakukan pengadaan. Pelayanan yang diberikan oleh LPSE Kota Batam ini sudah memberikan pelayanan yang baik kepada penyedia. Dalam tahap ini, ada beberapa penyedia jasa melalui yang namanya masa sanggah. Masa sanggah merupakan peserta yang mengikuti lelang merasa dirugikan dengan hasil yang ada. Namun tidak semua penyedia jasa akan melakukan masa sanggah tersebut, apabila penyedia mengalami dirugikan dengan hasil lelang yang ada maka



penyedia tersebut melakukan sanggahan kepada pihak panitia lelang. Pada tahun 2017 terdapat 278 sedangkan tahun 2018 terdapat 208 penyedia jasa yang mengikuti masa sanggah ini.

Panitia lelang Kota Batam telah menjawab atas sanggahan yang diterima dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan yaitu menjawab sanggahan setelah 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan dan penyedia jasa yang memberikan sanggahan juga diberi waktu 5 (lima) hari setelah penetapan pemenang diumumkan untuk menyampaikan sanggahan berupa tulisan. Hal ini dibuktikan dengan gambar dibawah ini:

Gambar 1  
Hasil Masa Sanggah



No	Tanggal Edit	Jadwal Original		Keterangan
		Mulai	Sampai	
1	13 Agustus 2018 15:09	16 Agustus 2018 08:00	20 Agustus 2018 12:00	Panitia masih membutuhkan waktu untuk evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi

Sumber: *Website LPSE Kota Batam*, 2019.

Pada gambar di atas menjelaskan tentang sanggahan dari peserta lelang atau penyedia jasa. Dengan adanya sanggahan tersebut maka panitia lelang mengambil sebuah tindakan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dialami peserta lelang. Tindakan yang dilakukan panitia lelang adalah mengevaluasi ulang penawaran sampai menemukan hasil akhir. Telah dibuktikan pada gambar di atas panitia

lelang LPSE Kota Batam telah menjawab sanggahan yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 5 (lima) hari setelah masuknya sanggahan. Sesuai dengan tabel yang ada di atas panitia lelang LPSE Kota Batam menjawab pada tanggal 16 Agustus 2018 – 20 Agustus 2018 hal ini terbukti bahwa panitia lelang LPSE Kota Batam telah menjawab sanggahan dengan waktu 4 (empat) hari saja. LPSE Kota Batam dapat dikatakan mampu menjalankan tugas dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masa sanggah yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **B. Tanya Jawab Penyedia Jasa**

Tanya jawab merupakan tempat yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam memberikan pelayanan untuk kebutuhan penyedia jasa yang terdapat di *website* LPSE Kota Batam yang beralamat (<https://lpse.batam.go.id/eproc4/tanyajawab>). Dengan adanya tanya jawab pada *website* LPSE Kota Batam memberikan kesempatan untuk penyedia jasa bertanya seputar pengadaan barang dan jasa dari mulai pertanyaan prosedur mendaftar menjadi peserta lelang hingga teknis lelang. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Bapak Sartono selaku karyawan dari CV. Almatra Buana megatakan bahwa :

“dengan adanya tanya jawab pada *website* LPSE Kota Batam ini membuat kami sebagai penyedia jasa apabila mengalami kebingungan dengan proses lelang yang kami jalankan maka tanya jawab yang ada di *website* sangat berguna dan respon dari panitia lelang sangat cepat dan jelas dalam menjawab pertanyaan yang kami tanyakan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dikatakan oleh salah satu penyedia jasa yang menggunakan tanya jawab pada *website* LPSE Kota Batam maka dapat disimpulkan bahwa tanya jawab ini sangat bermanfaat bagi penyedia jasa apabila penyedia jasa merasa tidak paham dengan proses lelang. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada tanya jawab ini lebih dominan kepada bagaimana cara mendaftar perusahaan sebagai anggota LPSE Kota Batam, mekanisme proses lelang meliputi cara meng-*upload* dokumen-dokumen. Dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan kepada panitia lelang LPSE Kota Batam, panitia sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk menjawab pertanyaan tersebut.

## **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas menekankan pada formalisasi dan legalisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas ditekankan pada responsivitas dan kemampuan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif. Dalam konteks

tersebut maka dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam hal ini para pegawai di LPSE Kota Batam sudah memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan LKPP. Dimana para pegawai sudah melaksanakan dan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut para penyedia yang mengikutsertakan PT/CV-nya di LPSE Kota Batam merasakan kinerja yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LPSE yang mengacu pada Perpres Nomor 16 tahun 2018.

Akuntabilitas pelayanan publik dapat diukur dengan akuntabilitas kinerja, biaya dan produk pelayanan dari LPSE itu sendiri. LPSE Kota Batam telah melaporkan tentang kegiatan yang dilakukan dilihat dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang ada. Laporan tersebut dibuat setiap tahunnya dan dilaporkan kepada LKPP. Laporan yang di buat oleh LPSE Kota Batam yaitu:

1. Rencana Paket Pengadaan
2. Progres Keuangan
3. Progres Fisik.

### **3. Faktor yang mempengaruhi kinerja**

Menurut Soesilo dalam (Tangkilisan, 2005) faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dilihat dari struktur organisasi, kebijakan pengelolaan berupa visi misi organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana atau prasarana.

#### A. Faktor Pendukung Kinerja LPSE Kota Batam

##### 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat usaha pembinaan atau pelatihan yang diberikan kepada pegawai yang berada di LPSE Kota Batam. Dari hasil wawancara dengan Ibu Maya selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian KOMINFO Kota Batam, pada tanggal 4 Januari 2019 menyatakan :

“Pihak LPSE Kota Batam menerjunkan anggota sebanyak 4 orang untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak LKPP untuk mengembangkan kualitas kinerja”

Dalam pelatihan ini membahas tentang Sosialisasi dan Bimbingan teknis SPSE Versi 4 yang diadakan pada tanggal 16-17 Maret 2017, pada akhir pelatihan dimana pihak LKPP memberikan kuisisioner kepada peserta yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh peserta paham dengan pelatihan yang sudah diberikan. Dari hasil kuisisioner yang sudah diisi oleh masing – masing peserta, pihak dari LKPP mengeluarkan hasil kuisisioner tersebut, dan ternyata empat peserta yang sudah diutus oleh pihak LPSE yang mendapatkan hasil skor tertinggi diantara peserta lainnya.

**Tabel 1**

**Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan Pegawai LPSE**

<b>Tahun</b>	<b>Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan Pegawai LPSE</b>	<b>Diselenggarakan Oleh</b>
2017	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPSE Versi 4.3	LKPP
	Pelatihan untuk Pokja	LPSE Kota Batam
	Sosialisasi di Tg. Pinang	LPSE Provinsi Kepulauan Riau
2018	Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 di Medan	LKPP
	Beberapa kegiatan LKPP di Kota Batam	LKPP

Sumber : LPSE Kota Batam, 2019

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa para kinerja dari pihak LPSE dapat dikatakan memiliki kemampuan serta pemahaman yang tinggi mengenai jalannya sistem *e-procurement*. Menurut beberapa penyedia jasa yang sudah diwawancarai oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa semua pegawai di LPSE Kota Batam sudah mampu dan mengerti bagaimana melayani para penyedia jasa dibandingkan dengan LPSE di daerah Kepulauan Riau lainnya. Para pegawai di LPSE Kota Batam sangat ahli dan paham bagaimana menjelaskan kepada para penyedia yang ingin mengikuti lelang agar mudah dipahami dalam melakukan registrasi dan verifikasi. Maka dalam hal ini kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem sangat berpengaruh dalam kelancaran

jalannya sistem *e-procurement*. Dimana kemampuan SDM menjadi tolak ukur yang pertama apabila ada kendala yang dialami oleh server dalam pengadaan barang dan jasa. Kemampuan SDM juga sangat berpengaruh bagi penyedia jasa yang kurang paham akan jalannya dari sistem *e-procurement* tersebut. Apabila tingkat pemahaman SDM baik, maka dalam penjelasan yang diinformasikan kepada pihak penyedia jasa yang kurang paham akan sistem *e-procurement*, para pegawai mampu menjelaskan dengan baik hingga maksudnya tersampaikan.

## 2. Sarana atau Prasarana

Sarana atau Prasarana menjadi salah satu faktor yang mendukung kinerja dari LPSE Kota Batam dilihat dari sistem *e-procurement* melalui *website*. Dengan adanya website LPSE Kota Batam yang beralamatkan ([www.lpse.batam.go.id](http://www.lpse.batam.go.id)) memudahkan pegawai dari LPSE sendiri maupun dari pihan Penyedia karena mudah untuk di akses dimana saja, dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh penyedia jasa. . Seperti dari wawancara dari Oki selaku karyawan dari PT. Rancang Adhya Selaras pada 18 Januari 2019 menyatakan:

“tidak seperti tahun 2010 yang lalu, yang dimana lelang di Kota Batam masih manual yang mengharuskan penyedia jasa untuk pergi ke dinas mana untuk mengikuti lelang, sejak adanya sistem *e-procurement* ini dapat memudahkan kita selaku penyedia jasa untuk mengikuti lalang tanpa harus kesana-kemari untuk mengantarkan dokumen lelang”

Dengan pemaparan diatas oleh Bapak Oki, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat memudahkan penyedia jasa dalam bekerja. Pemerintah sendiri sudah dikatakan berhasil dapat menciptakan sistem *e-procurement* dalam mewujudkan *good governance*.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor pendukung kinerja pada LPSE Kota Batam, dikarenakan dalam struktur organisasi LPSE Kota Batam saling berkaitan antara kepala, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional yang menghasilkan kinerja efektif dan efisien dalam menjalankan proses lelang.

Hal ini dibuktikan dengan antara kepala UPT LPSE Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan sub tata usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT LPSE Kota Batam dan kelompok jabatan fungsional pada LPSE Kota Batam ini mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu.



## B. Faktor Penghambat Kinerja LPSE Kota Batam

### 1. Sarana atau Prasarana

Sarana atau prasana juga merupakan faktor penghambat yaitu *server* sering mengalami *down*. *Server down* menjadi masalah utama dalam melakukan pekerjaan. Seperti hasil wawancara dari Bapak Indra Selaku Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam pada 14 Januari 2019 mengatakan :

“yang menjadikan kendala kita berkerja adalah apabila sistem sedang *down* yang disebabkan karena: upgrade sistem, koneksi internet yang tidak stabil, banyak yang mengakses. Apabila kita sedang memverifikasi data lelang, tiba-tiba terjadi koneksi internet yang tidak mendukung maka kami harus mengulanginya dari awal kembali. Hal ini yang sering terjadi yang membuat pekerjaan kita melebihi batas waktu yang telah ditentukan.”

Hal ini juga dialami oleh beberapa penyedia jasa, dari hasil wawancara Ibu Neti selaku Admin PT. Astakona Citra Grafindo pada 15 Januari 2019 mengatakan :

“sistem LPSE terkadang ada gangguan, sehingga untuk membuka website LPSE menjadi tidak bisa dan pernah mengalami jika sistem *down*, kami sebagai pihak penyedia kesusahkan untuk mengupload dokumen lelang sehingga harus kerja dua kali untuk menguploadnya kembali jika sistem sudah bener.”

Dapat disimpulkan bahwa *server down* menjadi permasalahan utama dalam proses pelelangan. Permasalahan yang sama dialami oleh penyedia jasa dan panitia lelang. Hal tersebut mengakibatkan proses pelelangan terhambat. Penyedia jasa mengalami kesulitan

untuk meng-*upload* dokumen sehingga apabila mengakibatkan kerja dua kali untuk meng-*upload* ulang ketika sistem sudah beroperasi dengan baik.

## 2. Visi Misi Organisasi

Salah satu faktor penghambat kinerja LPSE Kota Batam adalah visi misi organisasi yang dimana LPSE Kota Batam ini belum mempunyai visi misi organisasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Indra Sufian selaku Kepala Pelaksana LPSE Kota Batam pada tanggal 14 Januari 2019 menyatakan bahwa:

“LPSE Kota Batam belum memiliki visi dan misi organisasi dikarenakan LPSE Kota Batam baru saja bulan Januari ini disahkan sebagai UPTD sendiri”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Indra tersebut LPSE Kota Batam belum mampu membuat visi misi organisasi dikarenakan baru disahkannya LPSE menjadi UPTD sendiri. LPSE Kota Batam yang sebelumnya berada dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Batam.

## **KESIMPULAN**

Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam tahun 2017-2018 dapat dikatakan sudah baik. Hal yang menarik dari tahun yang diteliti oleh penulis sebagai bahan perbandingan untuk setiap tahunnya, yang menjadikan LPSE Kota Batam mampu meminimalisir kesalahan yang dialami oleh penyedia jasa pada tahun 2017 dengan cara meningkatkan kualitas kinerja tahun 2018. Dalam hal ini dibuktikan dengan penjabaran dua indikator menurut (Agus Dwiyanto, 2006) yaitu,

responsivitas dan akuntabilitas. Maka dapat disimpulkan dengan merujuk dua indikator diatas adalah :

1. Responsivitas, yang dilihat dengan daya tanggap dalam memecahkan masalah yang dialami oleh penyedia jasa, seperti :
  - a. Pada tahapan melalui masa sanggah. Tahun 2017 terdapat 278 penyedia yang melakukan ketidakpuasan terhadap hasil lelang yang ada sedangkan tahun 2018 terdapat 208. Hal ini dinilai bahwa kinerja LPSE Kota Batam mampu menjawab sanggahan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
  - b. LPSE Kota Batam membuat untuk tanya jawab agar mempermudah penyedia jasa untuk menyampaikan ketidaktahuan mereka terhadap proses lelang di Kota Batam.
2. Akuntabilitas, dituntut untuk selalu tunduk dan mengikuti aturan yang sudah ada dan tertera sebagai acuan untuk menilai kualitas kinerja. LPSE Kota Batam mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang telah di buat, dengan ini LPSE Kota Batam telah membuat laporan tahunan yang di laporkan kepada LKPP sebagai berikut:
  - a. Laporan rencana paket pengadaan pada tahun 2017-2018, pada laporan ini di tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah paket pengadaan pengadaan hal tersebut mengakibatkan jumlah anggaran yang diperlukan juga meningkat.

- b. Laporan progres fisik, isi laporan fisik ini menyatakan bahwa tahun 2017 dan 2018 belum mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dibuktinya dengan realisasi tidak menacapai target.
  - c. Laporan progres keuangan, laporan ini berisikan realisasi anggaran dan target anggaran. Pada tahun 2017 dan 2018 LPSE Kota Batam tidak mengalami yang namanya kekurangan anggaran karena pada tahun 2017 dan 2018 realisasi anggaran tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja, hal ini dibuktikan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara pembinaan dan pelatihan pegawai demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti: berkerja dengan dibantu oleh sistem yang di miliki LPSE yaitu *website* LPSE Kota Batam ([www.lpse.batam.go.id](http://www.lpse.batam.go.id)) dan struktur organisasi yang berkaitan antara kepala, sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional yang menghasilkan kinerja efektif dan efisien dalam menjalankan proses lelang.
4. Faktor-faktor penghambat kinerja, hal ini dibuktikan dengan sistem yang dimiliki LPSE Kota Batam apabila *server* sedang *down* dan belum memiliki visi dan misi organisasi. Hal ini dapat menghambat kinerja apabila proses lelang sedang berlangsung tiba-tiba *server*

down maka harus mengulanginya kembali dari tahap awal dan LPSE Kota Batam yang belum memiliki visi dan misi organisasi dikarenakan baru dilantik menjadi UPTD sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik, edisi revisi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haslan, W. 2013. *Evaluasi Kebijakan, 1–60*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **JURNAL**

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anton, R. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan E-Procurement Di Lingkungan Kota Tegal Tahun 2010*, 1–11.
- Apituley, R., Djakfar, L., & Wijatmiko, I. 2014. *Evaluasi Penerapan E-Procurement Pada Pengadaan Infrastruktur Pada Instansi Pemerintah Di Kota Ambon*, 8(2).
- Basrie, H. 2017. *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015*. Universitas Bengkulu.
- Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. 2004. *Systems to the Internet : The Adoption and Use of E-Procurement Technology Models*, 21(1), 10–12. [https://doi.org/10.1016/S0263-2373\(02\)00155-X](https://doi.org/10.1016/S0263-2373(02)00155-X)
- Destiasari, S. 2015. *Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ilahiyyah, E. N., & Pujotomo, D. 2014. *Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang / Jasa dengan Menggunakan Indonesia Procurement Maturity Model di Unit Layanan Pengadaan Universitas Diponegoro*, 1–7.
- Kasiwi, A. N. 2015. *Upaya Daya Saing Umkm Lokal Terhadap E-Procurement Di Provinsi Riau Tahun 2011-2015*, 1–16.

- Kusumo, A. 2013. *Evaluasi Kinerja Pokja UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengadaan Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1, 1–14.*
- Lovina, V., & Candra, S. 2013. *Evaluasi Penerapan Aplikasi E- Partisipasi E-Marketplace Serta Kepercayaan Sebagai Moderator ( Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi ), (VI), 1–9.*
- Nasution, S. P. 2012. *Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik ( E-Procurement ) Pada Lpse Kementerian Keuangan.* Universitas Indonesia.
- Nurhidayati, Munawir, A., & Suryo, E. A. 2017. *Persepsi Pemilik Proyek Dalam Lingkungan Lpse Terhadap Penilaian Kinerja Kontraktor, 11(3).*
- Semil, N. 2005. *Pelayanan Publik Instansi Pemerintah dan The New Public Service.* Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Jiana), 5.
- Siregar, M. P. 2017. *Evaluasi E-Procurement Pada Pengadaan Barang Dan Jasa ( Studi Kasus Di Pemerintah Kota Bandung ).*
- Sofyaningrum, E. D. 2010. *Evaluasi Penerapan Sepp (Sistem E -Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance Di Departemen Komunikasi Dan Informatika.* Universitas Indonesia.
- Udoyono, K. 2012. *E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta, 135–171.*

## **UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam.

## **WEBSITE**

- Wildansyah, S. (2018). *ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T.* Retrieved from <https://news.detik.com/berita/3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>. diakses pada tanggal 19 September 2018 pukul 13.30 WIB.
- <https://lpse.batam.go.id/eproc4/tanyajawab> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 10.00 WIB.

<https://lpse.batam.go.id/eproc4/lelang> diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 12.30 WIB.

<https://lpse.batam.go.id/eproc4/lelang/6611026/jadwal> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 12.00 WIB.

<https://lpse.batam.go.id/eproc4/jadwal/87765026/history> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 13.00 WIB

<https://lpse.batam.go.id/eproc4/publik/tentangkami> diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

<https://lpse.batam.go.id/eproc4/publik/strukturorganisasi> diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 13.30 WIB.

<https://jdih.lkpp.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 13.00 WIB.

<https://monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D257&tahun=2018> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 18.30 WIB.

## **WAWANCARA**

Wawancara Kepala Kelompok Jabatan Fungsional LPSE Kota Batam, Bapak Indra Sufian pada tanggal 14 Januari 2019.

Wawancara Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Batam, Ibu Maya pada tanggal 4 Januari 2019.

Wawancara PT. Tunesa Mulia Mandiri, perusahaan penyedia jasa pengadaan Kota Batam, Bapak Tulus Wikyyanto pada tanggal 10 Januari 2019.

Wawancara PT. Rancang Adhya Selaras, perusahaan penyedia jasa pengadaan Kota Batam, Bapak Oki pada tanggal 18 Januari 2019.

Wawancara CV. Almatra Buana , perusahaan penyedia jasa pengadaan Kota Batam, Bapak Sartono pada tanggal 16 Januari 2019.

Wawancara PT. Central Karyasindo, perusahaan penyedia jasa pengadaan Kota Batam, Bapak Dani pada tanggal 12 Januari 2019.

Wawancara PT. Astakona Citra Grafindo, perusahaan penyedia jasa pengadaan Kota Batam, Ibu Neti pada tanggal 15 Januari 2019.